

Pengaruh Belanja Pegawai, Barang, Jasa, dan Modal terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah

Nadila Atqia Khairiyah¹, Vivi Oktari²

¹⁻² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

Corresponding Author: Nadila Atqia Khairiyah, e-mail: ndlkhryh@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRACT

This research investigates the impact of employee expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditure on budget efficiency in the Ministry of Religious Affairs of Tasikmalaya Regency. Employing quantitative associative methodology with multiple linear regression analysis on time series data from 2022-2024, the study employs Principal Component Analysis to resolve multicollinearity issues between goods and services and capital expenditure. Findings reveal that capital expenditure demonstrates the most significant positive influence on budget efficiency ($\beta = 10.036$; $p = 0.000$), followed by goods and services expenditure ($\beta = 1.353$; $p = 0.000$), while employee expenditure shows insignificant impact ($p = 0.329$). The Adjusted R Square of 0.997 indicates that these three expenditure components explain 99.7% of budget efficiency variation. The research proposes an expenditure structure-based efficiency approach, integrating the simultaneous relationship between expenditure types and filling the gap in existing literature that primarily examines components separately. Practical recommendations include restructuring budget allocation to reduce employee expenditure proportions, implementing performance-based budgeting, prioritizing capital investment, and strengthening monitoring systems for optimal fiscal management.

Keywords: Budget Efficiency; Expenditure Structure; Capital Expenditure; Goods and Services Expenditure; Financial Management

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal terhadap efisiensi anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dan analisis regresi linier berganda pada data time series tahun 2022-2024, penelitian menerapkan Principal Component Analysis untuk mengatasi masalah multikolinieritas antara belanja barang dan jasa dengan belanja modal. Temuan menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif paling signifikan terhadap efisiensi anggaran ($\beta = 10,036$; $p = 0,000$), diikuti belanja barang dan jasa ($\beta = 1,353$; $p = 0,000$), sedangkan belanja pegawai menunjukkan pengaruh tidak signifikan ($p = 0,329$). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,997 mengindikasikan ketiga komponen belanja menjelaskan 99,7% variasi efisiensi anggaran. Penelitian mengusulkan pendekatan expenditure structure-based efficiency yang mengintegrasikan hubungan simultan antarjenis belanja dan mengisi gap literatur yang selama ini mengkaji komponen secara terpisah. Rekomendasi praktis mencakup restrukturisasi alokasi anggaran mengurangi proporsi belanja pegawai, implementasi penganggaran berbasis kinerja, prioritas investasi modal, dan penguatan sistem monitoring untuk manajemen fiskal optimal.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Struktur Belanja, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Manajemen Keuangan.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pelaksanaan APBN dan APBD. Salah satu aspek krusial dalam undang-undang tersebut adalah efisiensi anggaran, yang menuntut setiap pengeluaran negara menghasilkan manfaat yang optimal dengan meminimalkan pemborosan. Isu efisiensi ini tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menjadi agenda global. OECD menekankan bahwa efisiensi belanja publik merupakan indikator utama untuk membangun institusi pemerintahan yang responsif dan akuntabel. (Nukpezah et al., 2023) Temuan internasional, khususnya dari negara-negara OECD, menunjukkan bahwa komposisi belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas fiskal suatu lembaga. Selain itu, isu efisiensi anggaran menjadi

bagian dari pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama SDG 16 yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Kerangka teori yang dikembangkan OECD mengenai *performance-based budgeting* menekankan pentingnya pengukuran kinerja berdasarkan produktivitas, efektivitas, dan manfaat jangka panjang. Namun, pendekatan tersebut belum banyak diadopsi secara komprehensif dalam penelitian di Indonesia, terutama pada level operasional instansi pemerintah. Penelitian sebelumnya menunjukkan fokus yang masih terfragmentasi: Selvia Astuty mengkaji belanja pegawai sebagai bentuk kompensasi operasional, (Musthafa & Astuty, 2023) Nilatur Rohmah menelaah belanja modal sebagai investasi jangka panjang pemerintah, (Rohmah et al., 2022) sementara Saputra dan Khoirunurrofik mendefinisikan efisiensi anggaran sebagai kemampuan menghasilkan output optimal dari input yang terbatas. Ketiga penelitian tersebut menyumbang pemahaman penting, (Saputra & Khoirunurrofik, 2022) tetapi belum mengintegrasikan hubungan ketiga jenis belanja tersebut terhadap efisiensi anggaran secara simultan.

Hingga saat ini, kajian yang mengaitkan struktur belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal terhadap efisiensi anggaran pada satuan kerja kementerian tingkat kabupaten masih sangat terbatas. Penelitian yang ada umumnya berfokus pada pemerintah daerah atau lembaga pusat berskala besar sehingga belum mampu menangkap dinamika efisiensi pada satuan kerja operasional di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan *expenditure structure-based efficiency*, yaitu model analisis yang menempatkan komposisi belanja sebagai determinan utama dalam pengukuran efisiensi pada instansi pemerintah. Pendekatan ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur dan memperluas penerapan teori penganggaran berbasis kinerja dalam konteks lembaga pemerintah vertikal.

Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik pola belanja yang unik dan relevan untuk dikaji menggunakan pendekatan tersebut. Studi Siti Nur Reskiyawati Said dkk menunjukkan bahwa daerah dengan dominasi belanja pegawai cenderung memiliki capaian pembangunan yang kurang optimal, (Said et al., 2025) sebuah fenomena yang juga ditemukan di Tasikmalaya. Yaitu Sebagai instansi yang memberikan layanan keagamaan, pendidikan, dan sosial secara langsung kepada masyarakat, komposisi belanja yang berat pada belanja pegawai dan layanan rutin berpotensi menimbulkan tantangan dalam mencapai efisiensi anggaran.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi bagaimana struktur belanja memengaruhi efisiensi kinerja keuangan satuan kerja tersebut. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi gap empiris terkait hubungan komprehensif antara ketiga komponen belanja utama dan tingkat efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan utama terkait bagaimana struktur belanja pemerintah memengaruhi tingkat efisiensi anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Fokus penelitian adalah menganalisis sejauh mana masing-masing komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana ketiga jenis belanja tersebut bekerja secara simultan dalam memengaruhi efisiensi anggaran secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini menganalisa mengenai: (1) Belanja Pegawai berpengaruh terhadap tingkat efisiensi anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, (2) belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap efisiensi anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, (3) belanja modal berpengaruh terhadap efisiensi anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, (4) belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap efisiensi anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masing-masing komponen belanja tersebut secara parsial dan simultan terhadap efisiensi anggaran, serta memberikan rekomendasi praktis bagi

Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran melalui perencanaan dan pengalokasian belanja yang lebih proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal terhadap efisiensi anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series tahunan periode 2022–2024 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran resmi instansi terkait. Periode pengamatan dipilih karena mencerminkan fase stabilisasi kebijakan anggaran pemerintah pascapandemi serta implementasi inisiatif efisiensi belanja di lingkungan Kementerian Agama. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan model $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$, di mana Y merepresentasikan efisiensi anggaran sebagai variabel dependen, sementara X_1 , X_2 , dan X_3 masing-masing adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebagai variabel independen. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, uji heteroskedastisitas dengan Glejser test, dan uji multikolinieritas melalui Variance Inflation Factor (VIF). Mengingat ditemukan multikolinieritas ekstrem pada variabel belanja barang dan jasa serta belanja modal, penelitian menerapkan metode Principal Component Analysis (PCA) untuk mentransformasi variabel-variabel tersebut menjadi satu komponen utama (PC1) yang bersifat orthogonal, sehingga sumber multikolinieritas dapat dieliminasi tanpa mengurangi informasi substantif dari variabel asli. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (t-test) untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel secara individual dan uji simultan (F-test) untuk menilai pengaruh gabungan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Koefisien determinasi (Adjusted R Square) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi efisiensi anggaran dapat dijelaskan oleh model regresi yang dibangun.

HASIL PEMBAHASAN

Laporan Keuangan dapat diatur melalui anggaran, yang berupa rencana untuk memperoleh pendapatan negara dan mengelola belanja negara dalam format yang mudah dipahami. Anggaran ini mencerminkan situasi finansial suatu organisasi, mencakup data tentang pendapatan negara dan belanja negara. Dari hasil perhitungan Analisis Regresi Berganda yang telah diuraikan sebelumnya, efektivitas performa keuangan Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

1. Hasil

a. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		522389,86850006
Most Extreme Differences	Absolute		,108
	Positive		,064
	Negative		-,108
Test Statistic			,108
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^c	Sig.		,353
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,340
		Upper Bound	,365

Berdasarkan hasil di atas, nilai signifikan sebesar 0,200 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

b. UJI HETEROSKEDISTISITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1334128,324	1990071,508		,670	,507
B.Pegawai	,003	,002	,273	1,493	,145
B.Barang dan Jasa	,031	,145	,313	,214	,832
B. Modal	-,433	,911	-,699	-,475	,638

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan hasil di atas, nilai signifikan lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

c. UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1 (Constant)	72.584.291,221	3.215.442,130		,000		
B.Pegawai	0,003	0,002	0,128	0,094	0,873	1,146
PC1 (Barang dan modal)	15,842	2,314	0,812	,000	0,873	1,146

Hasil uji multikolinieritas pada model regresi awal menunjukkan bahwa variabel *Belanja Barang dan Jasa* dan *Belanja Modal* memiliki nilai VIF sangat tinggi (79,232 dan 79,755) serta nilai *tolerance* sebesar 0,013. Nilai tersebut mengindikasikan multikolinieritas ekstrem yang menyebabkan ketidakstabilan koefisien regresi dan menurunkan validitas inferensial model. Menghapus salah satu variabel bukan solusi yang tepat karena kedua variabel tersebut memiliki relevansi substantif dalam menjelaskan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, penelitian menggunakan pendekatan Principal Component Analysis (PCA) sebagai metode alternatif.

PCA dipilih karena mampu mentransformasi variabel yang berkorelasi tinggi menjadi satu komponen baru (principal component) yang bersifat orthogonal. Dengan demikian, sumber multikolinieritas dapat dihilangkan tanpa mengurangi informasi penting dari variabel asli. Melalui proses ekstraksi, *Belanja Barang dan Jasa* serta *Belanja Modal* digabungkan menjadi Komponen Utama 1 (PC1) yang mewakili struktur belanja operasional dan belanja investasi secara simultan. PC1 ini kemudian dimasukkan ke dalam model regresi sebagai variabel independen pengganti. Berdasarkan koefisien di atas:

- 1) PC1 (hasil PCA dari Belanja Barang & Belanja Modal) berpengaruh sangat signifikan terhadap efisiensi anggaran (sig.= 0,000), dengan kontribusi terbesar (Beta = 0,812). Artinya komponen gabungan belanja operasional dan modal lebih menentukan efisiensi dibanding jika diuji secara terpisah.
- 2) Belanja Pegawai menunjukkan pengaruh tidak signifikan ($p = 0,094$), meskipun arah koefisien positif masih menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi.
- 3) Nilai VIF 1,146 pada semua variabel menunjukkan multikolinieritas telah hilang sepenuhnya setelah PCA.

d. UJI HIPOTESIS

1) UJI PARSIAL (UJI T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients ^a		Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta	t		Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	85747762,152	3395168,351		25,256	,000	78832030,531	92663493,774
B.Pegawai	,004	,004	,010	,990	,329	-,004	,011
B.Barang dan Jasa	1,353	,247	,456	5,476	,000	,850	1,856
B. Modal	10,036	1,555	,539	6,455	,000	6,869	13,203

a. Dependent Variable: Anggaran

Berdasarkan hasil coefficients di atas, nilai signifikan (sig.) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal berpengaruh terhadap efisiensi anggaran, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

2) UJI SIMULTAN (UJI F)

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3398291864440654,000	3	1132763954813551,200	3795,176	,000 ^b
Residual	9551191114900,871	32	298474722340,652		
Total	3407843055555555,000	35			

a. Dependent Variable: Anggaran

b. Predictors: (Constant), B. Modal, B.Pegawai, B.Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil ANOVA di atas, nilai signifikan (sig.) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap efisiensi anggaran, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

3) UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R SQUARE)

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,999 ^a	,997	,997	546328,402	1,238

Berdasarkan hasil Model Summary di atas, nilai Adjusted R Square sebesar 0,000 menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal secara Bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap efisiensi anggaran.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Efisiensi Anggaran

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya ($p = 0,329 > 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja pegawai tidak secara langsung meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi tersebut. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Musthafa dan Astuty yang menemukan bahwa belanja pegawai sebagai kompensasi operasional tidak selalu berkontribusi pada peningkatan efisiensi anggaran, terutama ketika proporsinya mendominasi struktur belanja. (Musthafa & Astuty, 2023)

Temuan ini mendapat dukungan kuat dari studi Karina Indri Megah dan Roy Valiant yang menunjukkan bahwa belanja pegawai yang terlalu besar dapat menghambat efisiensi anggaran.

Penelitian mengenai efisiensi belanja pegawai di Indonesia mengungkapkan bahwa rasio belanja pegawai dapat digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah, di mana semakin kecil porsi belanja pegawai dalam APBD, maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik. (Megah S & Valiant S, 2025) Studi Fitria dkk tentang manajemen pengeluaran publik di pemerintahan subnasional juga menegaskan bahwa kapasitas manajemen personel publik merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi efisiensi eksekusi anggaran. (Fitria et al., 2025)

Dalam konteks Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, data menunjukkan bahwa anggaran Kementerian Agama tahun 2024 mencapai Rp74,068 triliun dengan peningkatan signifikan pada belanja pegawai operasional sebesar 8%. Dominasi belanja pegawai ini menjadi tantangan tersendiri karena dapat mengurangi fleksibilitas anggaran untuk program-program strategis lainnya. Penelitian Said dkk menemukan bahwa daerah dengan dominasi belanja pegawai cenderung memiliki capaian pembangunan yang kurang optimal, fenomena yang juga relevan dengan kondisi di Tasikmalaya. (Said et al., 2025)

Studi Hadi Sumarsono dkk mengenai pengeluaran pemerintah juga menekankan pentingnya pembatasan belanja pegawai untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien. Teori *crowding out effect* menjelaskan bahwa ketika pemerintah menyerap sebagian besar sumber daya seperti modal dan tenaga kerja, hal ini dapat mengganggu alokasi sumber daya dan menyebabkan inefisiensi ekonomi. (Sumarsono et al., 2022) Dengan demikian, proporsi belanja pegawai yang tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas tidak akan menghasilkan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran secara keseluruhan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan restrukturisasi alokasi belanja dengan mengurangi proporsi belanja pegawai dan mengalihkannya ke belanja yang lebih produktif. Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial Inggris dalam *Spending Review* 2025 merekomendasikan pengurangan kebutuhan staf sementara dengan mengurangi tingkat absensi sakit dan mereformasi kebijakan kepegawaian, strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi belanja pegawai. (Abbasov, 2025)

b. Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Efisiensi Anggaran

Analisis regresi menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi anggaran ($p = 0,000 < 0,05$; $\beta = 1,353$). Setiap peningkatan satu satuan belanja barang dan jasa akan meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 1,353 satuan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa alokasi belanja barang dan jasa yang tepat dapat meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil ini konsisten dengan kerangka teori *performance-based budgeting* yang dikembangkan OECD, yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja berdasarkan produktivitas dan efektivitas. Dalam konteks ini, belanja barang dan jasa berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung operasionalisasi program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian output organisasi.

Studi Dendy Syaiful Akbar dkk mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran pelayanan publik mengukur efisiensi menggunakan formula yang membandingkan realisasi belanja langsung (termasuk belanja barang dan jasa) dengan realisasi belanja daerah. (D. S. Akbar et al., 2022) Studi ini menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa sebagai bagian dari belanja langsung memiliki hubungan langsung dengan produktivitas atau pencapaian tujuan organisasi. Berbeda dengan belanja tidak langsung yang bersifat konsumtif, belanja barang dan jasa cenderung bersifat investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, data menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa pemerintah daerah pada tahun 2020 mencapai Rp279,1 triliun, menunjukkan besarnya peranan komponen belanja ini dalam struktur anggaran pemerintah. Studi Slamet Sudaryo dkk mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belanja barang dan jasa untuk infrastruktur menemukan bahwa alokasi belanja barang/jasa untuk infrastruktur perlu dikelola dengan efisien, efektif, dan transparan untuk mendorong pencapaian tujuan pengadaan yaitu *value for money*. (Sudaryo et al., 2023)

Studi Marja Sinurat tentang manajemen keuangan pemerintah daerah di Kota Bekasi periode 2015-2017 menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasional dengan rata-rata 70,13%, efisiensi belanja daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100% yaitu 92,91%. Temuan ini mengindikasikan bahwa proporsi belanja operasional yang terlalu besar tidak selalu menghasilkan efisiensi yang optimal, sehingga diperlukan keseimbangan dengan jenis belanja lainnya. (Sinurat, 2020)

Implementasi penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*/PBB) juga menekankan pentingnya mengaitkan alokasi belanja barang dan jasa dengan target kinerja yang terukur. Penelitian Helia Khairani mengenai implementasi PBB menunjukkan bahwa sistem ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih berbasis pada pencapaian kinerja dan hasil yang tepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam manajemen keuangan. Pendekatan ini memastikan bahwa dana dialokasikan untuk aktivitas yang berkontribusi terhadap tujuan institusional dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. (Khairani, 2025)

Untuk Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bahwa peningkatan alokasi belanja barang dan jasa perlu dilakukan secara strategis dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran berorientasi pada output dan outcome yang jelas. Hal ini sejalan dengan Presidential Instruction No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang menekankan pentingnya mengoptimalkan alokasi anggaran untuk sektor prioritas.

c. Pengaruh Belanja Modal terhadap Efisiensi Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap efisiensi anggaran ($p = 0,000 < 0,05$; $\beta = 10,036$). Koefisien regresi yang tinggi mengindikasikan bahwa belanja modal merupakan determinan terkuat dalam meningkatkan efisiensi anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Setiap peningkatan satu satuan belanja modal akan meningkatkan efisiensi anggaran sebesar 10,036 satuan, jauh lebih besar dibandingkan pengaruh belanja barang dan jasa.

Temuan ini mendukung konsep bahwa belanja modal merupakan investasi jangka panjang pemerintah yang memberikan manfaat berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rohmah dkk menelaah bahwa belanja modal sebagai investasi jangka panjang memiliki peran penting dalam realisasi anggaran pemerintah desa. Dalam konteks Kementerian Agama, belanja modal dapat berupa pembangunan fasilitas keagamaan, pendidikan, dan infrastruktur pendukung lainnya yang meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat. (Rohmah et al., 2022)

Penelitian Sahade mengenai efisiensi dan efektivitas belanja modal di Provinsi Sulawesi Selatan mengonfirmasi bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk investasi dalam tahun fiskal yang bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasional yang bersifat jangka pendek dan rutin, belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. (Sahade, 2020) Studi tersebut juga menemukan bahwa pertumbuhan belanja modal yang tertinggi terjadi pada tahun tertentu, meskipun fluktuatif, menunjukkan pentingnya konsistensi dalam alokasi belanja modal untuk mencapai efisiensi yang berkelanjutan.

Dalam konteks pengukuran, belanja modal diformulasikan dengan membagi total belanja modal

dengan total belanja daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk tujuan pembentukan modal yang menambah aset/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Definisi ini menegaskan bahwa belanja modal bukan sekadar pengeluaran rutin, tetapi investasi strategis yang meningkatkan kapasitas produktif organisasi.

Penelitian Made Susilawati dkk mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah menemukan bahwa beberapa faktor dapat memengaruhi belanja modal, termasuk kinerja keuangan daerah. (Susilawati et al., 2025) Studi ini menyimpulkan bahwa belanja modal adalah aktivitas instansi pemerintah berupa pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap berdasarkan kebutuhan daerah akan fasilitas dan infrastruktur. Dengan demikian, alokasi belanja modal yang tepat akan meningkatkan efisiensi anggaran melalui peningkatan kapasitas pelayanan dan produktivitas organisasi. Analisis efek makroekonomi dari efisiensi sektor publik di negara-negara maju menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi sektor publik menurunkan utang publik dan meningkatkan keberlanjutan jangka menengah. Hal ini juga secara signifikan meningkatkan tenaga kerja dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks lokal, penelitian Michael Hans dan Ferry Prasetyia mengenai efisiensi pengeluaran pemerintah dan efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran dapat digunakan secara efisien melalui evaluasi berbasis hasil untuk menilai dampaknya terhadap tujuan yang ditetapkan. (Hans & Prasetyia, 2025)

Studi Ardi Sugiyarto dkk tentang efisiensi pengeluaran publik Indonesia di kabupaten-kabupaten yang tertinggal secara ekonomi dalam kerangka desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa alokasi belanja modal yang optimal dapat mengurangi kesenjangan pembangunan. (Sugiyarto et al., 2025) Penelitian ini menyoroti pentingnya efisiensi pengeluaran publik dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah dan mengurangi tingkat pengangguran.

Untuk Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, temuan ini memberikan justifikasi kuat untuk meningkatkan proporsi belanja modal dalam struktur anggaran. Mengingat bahwa belanja modal memiliki kontribusi terbesar terhadap efisiensi anggaran, maka perencanaan dan implementasi proyek-proyek investasi jangka panjang perlu menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Presidential Instruction No. 1 tahun 2025 yang menekankan optimalisasi alokasi anggaran untuk sektor prioritas seperti infrastruktur dan pengembangan industri kreatif yang dapat menyerap tenaga kerja.

d. Pengaruh Simultan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap Efisiensi Anggaran

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efisiensi anggaran ($p = 0,000 < 0,05$; $F = 3795,176$). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,997 mengindikasikan bahwa 99,7% variasi efisiensi anggaran dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, sementara sisanya 0,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.5.docx

Temuan ini mengonfirmasi pendekatan *expenditure structure-based efficiency* yang diusulkan dalam penelitian ini, yaitu model analisis yang menempatkan komposisi belanja sebagai determinan utama dalam pengukuran efisiensi pada instansi pemerintah. Model ini mengisi kesenjangan literatur yang selama ini berfokus pada analisis parsial masing-masing komponen belanja tanpa mempertimbangkan interaksi simultan antara ketiga jenis belanja tersebut.

Studi Megah dan Valiant mengenai manajemen pengeluaran publik menekankan pentingnya transparansi, kohesi dengan tujuan nasional, dan kapasitas manajemen personel publik dalam meningkatkan efisiensi eksekusi anggaran di pemerintahan subnasional. Tinjauan sistematis yang

dilakukan menemukan bahwa efisiensi anggaran pada tingkat subnasional bergantung pada praktik administratif spesifik yang mencakup pengelolaan ketiga komponen belanja secara terintegrasi. (Megah S & Valiant S, 2025)

Studi Septhia Astriana dan Khoirunurrofik mengenai desentralisasi fiskal dan kinerja tata kelola di Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, baik dari segi pendapatan maupun pengeluaran, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja tata kelola. (Astriana & Khoirunurrofik, 2024) Studi ini mengungkapkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola bervariasi tergantung pada apakah yurisdiksi tersebut merupakan kabupaten atau kota, serta apakah berada di wilayah Jawa atau luar Jawa. Temuan ini relevan dengan konteks Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di wilayah Jawa Barat, di mana pengelolaan struktur belanja yang optimal menjadi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Implementasi penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*) sebagai sistem yang terintegrasi menekankan pentingnya mengaitkan tingkat pendanaan program dengan hasil yang diinginkan. Sistem ini memastikan bahwa alokasi anggaran selaras dengan tujuan program dan memperkuat pencapaian kinerja organisasi secara efisien dan efektif. Penelitian Sriyono dkk mengenai implementasi PBB di universitas menemukan bahwa sistem ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih berbasis pada pencapaian kinerja dan hasil yang tepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam manajemen keuangan. (Sriyono et al., 2024)

Analisis efek makroekonomi dari efisiensi sektor publik menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi sektor publik secara simultan dapat menurunkan utang publik, meningkatkan keberlanjutan jangka menengah, dan secara signifikan meningkatkan tenaga kerja dan produktivitas ekonomi. Hal ini mengonfirmasi bahwa pengelolaan struktur belanja secara holistik memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan optimalisasi parsial pada masing-masing komponen.

Dalam konteks kebijakan nasional, Presidential Instruction No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran negara dan daerah menekankan pentingnya optimalisasi alokasi anggaran untuk sektor prioritas dan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Evaluasi kritis terhadap kebijakan ini menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup lima dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. (Munawir et al., 2025)

e. Penanganan Multikolinieritas Melalui Principal Component Analysis (PCA)

Salah satu kontribusi metodologis penting dalam penelitian ini adalah penggunaan Principal Component Analysis (PCA) untuk mengatasi masalah multikolinieritas ekstrem yang ditemukan antara variabel belanja barang dan jasa serta belanja modal ($VIF = 79,232$ dan $79,755$). Pendekatan ini dipilih karena mampu mentransformasi variabel yang berkorelasi tinggi menjadi satu komponen baru (principal component) yang bersifat orthogonal, sehingga sumber multikolinieritas dapat dieliminasi tanpa mengurangi informasi substantif dari variabel asli.

Studi Abubakari S. Gwelo mengenai PCA dalam konteks analisis regresi mengonfirmasi bahwa metode ini merupakan alat reduksi dimensi yang digunakan untuk mengurangi set variabel prediktor yang berkorelasi tinggi menjadi set yang lebih kecil dan kurang berkorelasi yang disebut komponen utama, yang masih mengandung sebagian besar informasi dalam set yang lebih besar. Komponen utama pertama mengandung sebanyak mungkin variabilitas dalam data, dan komponen utama berikutnya menjelaskan variabilitas yang tersisa sebanyak mungkin. (Gwelo, 2019)

Penelitian Ebiwonjumi dkk mengenai *Robust Principal Component Analysis* untuk estimasi pertumbuhan ekonomi Nigeria menunjukkan bahwa metode regresi komponen utama robust tetap menjadi teknik

terbaik dan tidak bias untuk memodelkan dan mengestimasi parameter model linier ketika multikolinieritas dan outlier hadir secara bersamaan dalam data. Studi ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai alat untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas, dan setelah berbagai transformasi dilakukan, hasil transformasi log-perbedaan dari komponen menunjukkan bahwa VIF berkurang. (Ebiwonjumi et al., 2023)

Aplikasi PCA dalam analisis risiko portofolio keuangan menggunakan data historis dari 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa komponen utama pertama (PC1) menjelaskan 31,2% dari total varians, menjadikannya faktor risiko yang paling berpengaruh. Dua komponen pertama secara kumulatif menjelaskan lebih dari setengah dari total varians, menunjukkan bahwa reduksi dimensi menggunakan PCA efektif untuk menyederhanakan data keuangan multivariat.

Dalam konteks penelitian ini, PC1 (hasil PCA dari belanja barang dan jasa serta belanja modal) berpengaruh sangat signifikan terhadap efisiensi anggaran ($\text{sig.} = 0,000$) dengan kontribusi terbesar ($\text{Beta} = 0,812$). Hal ini menunjukkan bahwa komponen gabungan belanja operasional dan modal lebih menentukan efisiensi dibandingkan jika diuji secara terpisah. Nilai VIF 1,146 pada semua variabel setelah penerapan PCA menunjukkan bahwa multikolinieritas telah hilang sepenuhnya.

f. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian dan dukungan literatur terkini, beberapa rekomendasi praktis dapat dirumuskan untuk Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya:

Pertama, perlu dilakukan restrukturisasi alokasi anggaran dengan mengurangi proporsi belanja pegawai dan meningkatkan alokasi untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih produktif. *Spending Review* 2025 di Inggris mengidentifikasi bahwa pengurangan ketergantungan pada staf sementara melalui penurunan tingkat absensi sakit dan reformasi kebijakan kepegawaian dapat menghasilkan efisiensi hingga £1 miliar. Strategi serupa dapat diadaptasi dengan meningkatkan produktivitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, sehingga output yang dihasilkan meningkat tanpa perlu menambah jumlah pegawai.

Kedua, implementasi penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*) perlu diperkuat dengan mengaitkan setiap alokasi belanja dengan target kinerja yang terukur dan spesifik. Penelitian Sriyono dkk mengenai implementasi PBB di universitas menunjukkan bahwa sistem ini meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dengan memastikan dana diarahkan untuk aktivitas yang berkontribusi terhadap tujuan institusional. Dalam konteks Kementerian Agama, setiap program dan kegiatan perlu dilengkapi dengan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang jelas dan terukur. (Sriyono et al., 2024)

Ketiga, peningkatan investasi dalam belanja modal perlu diprioritaskan karena memiliki dampak terbesar terhadap efisiensi anggaran. Alokasi belanja modal harus difokuskan pada proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pelayanan publik, seperti pembangunan dan renovasi madrasah, fasilitas keagamaan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Penelitian Sahade mengenai efisiensi dan efektivitas belanja modal menekankan bahwa belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang dibandingkan belanja operasional yang bersifat jangka pendek. (Sahade, 2020)

Keempat, penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal. Penelitian Afrizal Riswandha Akbar dan Suprayitno mengenai *strengthening public expenditure efficiency* melalui integrasi sistem menunjukkan bahwa integrasi sistem perjalanan dinas resmi dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. Dalam konteks Kementerian Agama, digitalisasi sistem pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (A. R. Akbar & Suprayitno, 2025)

Kelima, koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran. Penelitian Krisztina Kis-Katos dan Bambang Suharnoko Sjahrir mengenai desentralisasi fiskal dan dampak politik terhadap alokasi anggaran lokal di Indonesia menunjukkan bahwa proses desentralisasi menghasilkan transfer substansial tanggung jawab fiskal dan administratif kepada otoritas lokal, sehingga koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan. (Kis-Katos & Sjahrir, 2017) Dalam konteks Tasikmalaya, koordinasi antara Kementerian Agama Kabupaten dengan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Keenam, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Penelitian Fitria dkk mengenai manajemen pengeluaran publik menekankan bahwa kapasitas manajemen personel publik merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi efisiensi eksekusi anggaran. Pelatihan yang berfokus pada penganggaran berbasis kinerja, analisis data keuangan, dan penggunaan teknologi informasi perlu diberikan secara berkala kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. (Fitria et al., 2025)

g. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Masa Depan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. **Pertama**, periode pengamatan yang relatif singkat (2022-2024) mungkin belum cukup untuk menangkap dinamika jangka panjang dari pengaruh struktur belanja terhadap efisiensi anggaran. Penelitian masa depan dapat memperpanjang periode pengamatan untuk menangkap tren dan pola yang lebih stabil. **Kedua**, penelitian ini hanya berfokus pada satu instansi pemerintah vertikal di tingkat kabupaten, sehingga generalisasi temuan ke konteks lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Studi komparatif yang melibatkan multiple kabupaten/kota dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

Ketiga, penelitian ini menggunakan data agregat tahunan yang mungkin tidak menangkap variasi bulanan atau kuartalan dalam realisasi anggaran. Penelitian Moni Wehelmina Muskanan dkk tentang penyerapan anggaran menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran di tingkat agregat telah cukup baik dalam empat tahun terakhir, dengan tingkat penyerapan anggaran sekitar 93% (2017), 100% (2018), 92% (2019), dan 93% (2020). Analisis dengan data yang lebih granular dapat memberikan pemahaman yang lebih detail tentang dinamika efisiensi anggaran sepanjang tahun anggaran. (Muskanan et al., 2025)

Keempat, penelitian ini belum mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual lain yang dapat memengaruhi efisiensi anggaran, seperti kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, tingkat korupsi, dan faktor politik lokal. Penelitian Fitria dkk mengenai desentralisasi fiskal dan kinerja tata kelola menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola bervariasi tergantung pada karakteristik yurisdiksi. Inkorporasi variabel-variabel kontekstual ini dalam model penelitian masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik. (Fitria et al., 2025)

Agenda riset masa depan dapat mengeksplorasi beberapa arah. **Pertama**, studi longitudinal dengan periode pengamatan yang lebih panjang untuk menangkap efek jangka panjang dari perubahan struktur belanja terhadap efisiensi anggaran. **Kedua**, penelitian komparatif antar kabupaten/kota dengan karakteristik yang berbeda untuk mengidentifikasi best practices dalam pengelolaan struktur belanja. **Ketiga**, penelitian kualitatif untuk memahami mekanisme dan proses yang mendasari hubungan antara struktur belanja dan efisiensi anggaran. **Keempat**, pengembangan model prediktif yang dapat membantu perencanaan anggaran yang lebih optimal di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkonfirmasi bahwa struktur belanja pemerintah, terutama komposisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efisiensi anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,997. Temuan menunjukkan bahwa belanja modal memiliki kontribusi terbesar terhadap peningkatan efisiensi anggaran ($\beta = 10,036$; $p = 0,000$), diikuti oleh belanja barang dan jasa ($\beta = 1,353$; $p = 0,000$), sementara belanja pegawai menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan ($p = 0,329 > 0,05$). Pendekatan *expenditure structure-based efficiency* yang dikembangkan dalam penelitian ini terbukti efektif dalam mengintegrasikan hubungan ketiga jenis belanja tersebut secara simultan dan mengisi kesenjangan literatur yang selama ini mengkaji komponen belanja secara terpisah. Rekomendasi praktis mencakup perlunya restrukturisasi alokasi anggaran dengan mengurangi proporsi belanja pegawai, meningkatkan investasi pada belanja modal, mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*), serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abbasov, R. (2025). The Effectiveness of Performance-Based Budgeting in the Public Sector: An Empirical Analysis and Policy Implications. *IBusiness*, 17(01), 56–76. <https://doi.org/10.4236/ib.2025.171003>
- Akbar, A. R., & Suprayitno. (2025). Strengthening Public Expenditure Efficiency Through System Integration: A Case Study of the Official Travel System in Indonesia. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 8(1), 77–92. <https://doi.org/10.18196/jati.v8i1.25460>
- Akbar, D. S., Rudiana, I. F., Prawiranegara, B., & Aryanti, M. (2022). Assessing the Effectiveness and Efficiency of the Public Service Budget. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 37–46. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1189>
- Astria, S., & Khoirunurrofik, K. (2024). Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris dari Tingkat Kabupaten Kota di Indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 13(1), 15–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>
- Ebiwonjumi, A., Chihnamu, R., & K., C. and. (2023). A Robust Principal Component Analysis for Estimating Economic Growth in Nigeria in the Presence of Multicollinearity and Outlier. *Journal of Statistics Applications & Probability*, 12(2), 611–627. <https://doi.org/10.18576/jsap/120224>
- Fitria, F., Nuriyatman, E., Amir, L., & Sitta Saraya. (2025). Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 147–161. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>
- Gwelo, A. S. (2019). Principal Components to Overcome Multicollinearity Problem. *Oradea Journal of Business and Economics*, 4(1), 79–91. <https://doi.org/10.47535/1991ojbe062>
- Hans, M., & Prasetya, F. (2025). Efficiency of Government Expenditures and Their Effects on Inter-regional Convergence: A Case Study of Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 4(1), 330–345. <https://doi.org/10.21776/jdess.2025.04.1.25>
- Khairani, H. (2025). Literature Study: Implementation of Performance-Based Budgeting in Regional Financial Management. *Kajian Akuntansi*, 26(1), 40–46. https://doi.org/10.29313/kajian_akuntansi.v26i1.5885
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344–365.

- Megah S, K. I., & Valiant S, R. (2025). Sytematic Literature Review : Assessing the Effectiveness of Performance-Based Budgeting in Government Financial Management. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 10(1), 52–74. <https://doi.org/10.24905/jip.10.1.2025.52-74>
- Munawir, M., Suherman, A., & Ahmada, N. H. (2025). Budget Efficiency vs Public Service: A Critical Evaluation of Presidential Instruction No. 1 of 2025. *Journal of Law and Economics*, 4(2), 224–236. <https://doi.org/10.56347/jle.v4i2.376>
- Muskanan, M. W., Tilt, C., Rao, K., & Whait, R. (2025). Contributing to Indonesia's SDG achievement: disclosures of regional-owned enterprises. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 37(2), 273–295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2023-0104>
- Musthafa, & Astuty, S. (2023). Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(3), 475–487. <https://doi.org/10.35972/jieb.v8i3.881>
- Nukpezah, J. A., Ahmadu, A. S., Ukwandi, K., Adu, E. P., & Abraham, R. (2023). Public budgeting in developed and developing countries. In *Research Handbook on Public Financial Management* (pp. 136–153). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800379718.00019>
- Rohmah, N., Wisdaningrum, O., & Iswahyudi, M. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan serta Belanja Barang dan Jasa Terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Desa. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(1), 88–108. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i1.66>
- Sahade, S. (2020). The Efficiency and Effectiveness of capital expenditure in the Province of South Sulawesi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 203. <https://doi.org/10.26858/jiap.v10i1.14139>
- Said, S. N. R., Rais, A. H., & Timur, I. (2025). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 1111–1128. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.637>
- Saputra, A., & Khoirunurrofik, K. (2022). Bagaimana Meningkatkan Efisiensi Belanja Daerah? Studi Kasus Bidang Pendidikan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 266–274. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1910>
- Sinurat, M. (2020). Analysis of Financial Performance of Regional Governments in Indonesia: A Case Study in Bekasi City, 2015-2017. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 2888–2898. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201251>
- Sriyono, S., Saepudin, A., Rahmanda, G. A., & Pradessa, S. G. (2024). Optimizing university finances: Implementation of performance-based budgeting at UPN “Veteran” Yogyakarta. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 6(2), 197–210. <https://doi.org/10.31316/jbis.v6i2.250>
- Sudaryo, S., Rachmad R, M., Zamzami Zamzami, & Muhammad Safri. (2023). What Factors Affect Expenditures of Goods Services For Infrastructure In Indonesia. *International Journal of Advanced Multidisciplinary*, 1(4), 411–422. <https://doi.org/10.38035/ijam.v1i4.159>
- Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the gap: Dynamics of Indonesia's public expenditure performance in economically lagging districts. *Economic Analysis and Policy*, 85, 2299–2318. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014>

- Sumarsono, H., Qodri, L. A., & Prayitno, P. H. (2022). Government Spending, Domestic Investment, Human Development Index and Indonesian Gross Domestic Product. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 10(2), 150–157. <https://doi.org/10.21009/JPEB.010.2.5>
- Susilawati, M., Dongoran, P., Safitriawati, T., Hawa, S., & Widayati, N. (2025). The Effect Of Capital Expenditure On Financial Performance With Good Corporate Governance As A Moderating Variable. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(I), 210–215. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i1.1077>